

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

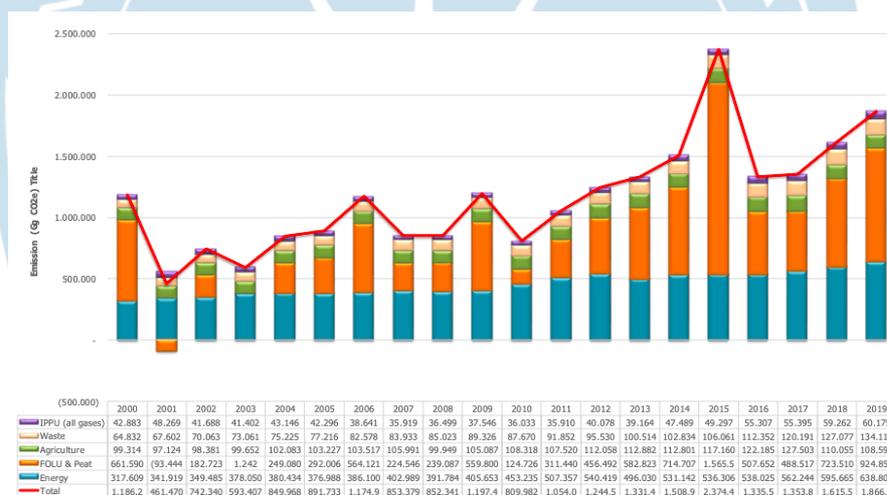
Perubahan iklim yang ekstrim dan pemanasan global menjadi isu penting dan marak diperbincangkan. Pada tahun 2015 lalu, telah dibuat suatu perjanjian internasional yang mengikat secara hukum mengenai perubahan iklim yaitu *Paris Agreement*. Dalam *Paris Agreement*, sebanyak 196 negara berkomitmen untuk bersama-sama melakukan upaya ambisius dalam menghadapi perubahan iklim serta dampaknya. Tujuan utama dari *Paris Agreement* adalah menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat celsius dan berusaha untuk menjaga kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat celsius, mencapai *net-zero emission* sebagai tujuan jangka panjang, membatasi emisi gas rumah kaca melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC), serta melakukan *global stocktake* secara berkala (*Paris Agreement*, 2015). Namun pada praktiknya, *Emissions Gap Report* (2021) melaporkan kenaikan suhu global hingga 2,7 derajat celsius.

Salah satu penyebab utama dari situasi darurat iklim adalah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) atau yang umum dikenal sebagai emisi karbon. Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Dan Mitigasi Gas Rumah Kaca Bidang Energi, emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu. Gas rumah kaca ialah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik itu secara alami ataupun secara antropogenik yang menyerap serta memancarkan kembali radiasi inframerah. Emisi karbon

dihasilkan dari aktivitas penggunaan energi, proses industri dan penggunaan produk, pertanian, kehutanan dan kebakaran gambut, serta limbah (Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan *Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV)*, 2020). Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menurunkan emisi karbon, salah satunya melalui *Paris Agreement*. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, serta tingginya populasi penduduk, Indonesia tak luput menjadi salah satu negara penyumbang emisi karbon.

Langkah yang diambil Indonesia untuk turut ambil bagian dalam mengatasi perubahan iklim adalah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*. Dalam perjalanan menuju terwujudnya tujuan *Paris Agreement*, Indonesia berkomitmen untuk mencapai pengurangan emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41% dengan dukungan kerja sama internasional pada tahun 2030 (*Updated Nationally Determined Contribution Republik of Indonesia*, 2021). Selain *Paris Agreement*, ada pula *Conference of Parties (COP)* yang merupakan bentuk upaya penanggulangan situasi darurat perubahan iklim. COP dihadiri oleh negara-negara yang menandatangani *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*. Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung dalam COP. Pada *Conference of Parties 26* yang diselenggarakan pada tahun 2021 di Glasgow, Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen Indonesia untuk mencapai *carbon net sink* di tahun 2030.

Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) tahun 2020 menunjukkan perkembangan emisi GRK nasional dalam sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 2015, total emisi GRK nasional sebesar 2.374.403 Gg CO₂e. Selanjutnya pada tahun 2016, total emisi GRK nasional mengalami penurunan menjadi 1.335.521 Gg CO₂e. Hal ini menunjukkan keseriusan Indonesia terkait dengan komitmennya dalam mengurangi emisi karbon. Akan tetapi pada tahun 2017 hingga 2019, emisi GRK nasional mengalami peningkatan kembali yaitu pada tahun 2017 sebesar 1.353.850 Gg CO₂e, pada tahun 2018 sebesar 1.615.569 Gg CO₂e, dan pada tahun 2019 sebesar 1.866.552 Gg CO₂e.



Gambar 1. 1. Profil Emisi GRK Nasional Tahun 2000-2019

Sumber: Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) 2020

Jika melihat pada perkembangan emisi GRK nasional tahun 2000 hingga 2019, emisi GRK Indonesia paling banyak berasal dari sektor kehutanan dan kebakaran gambut serta konsumsi energi. Kecenderungan emisi sektor energi meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan peningkatan kebutuhan dan penggunaan energi. Sepanjang kurun waktu tahun 2000 hingga 2019, penggunaan

energi pada industri yaitu termasuk penggunaan bahan bakar pada pembangkit listrik dan panas, kilang minyak dan proses batu bara merupakan penyumbang emisi terbesar. Selanjutnya diikuti oleh penggunaan bahan bakar untuk transportasi, serta serapan energi yang digunakan pada kegiatan manufaktur (Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Dan *Monitoring*, Pelaporan, Verifikasi (MPV), 2020).

Aktivitas operasi perusahaan tak luput menjadi salah satu penyumbang emisi karbon. Dalam upaya menurunkan tingkat emisi dunia yang disebabkan oleh aktivitas operasi perusahaan, maka dibentuklah *Kyoto Protocol* oleh UNFCCC pada tahun 1997. Tujuan utama dari *Kyoto Protocol* adalah mengurangi efek pemanasan global dengan membawa emisi GRK ke tingkat yang dapat diterima (Freedman & Jaggi, 2005). Sejak terbentuknya *Kyoto Protocol*, semua perusahaan terutama yang bergerak pada bidang yang erat dengan lingkungan, berada di bawah tekanan yang meningkat untuk mencegah emisi karbon yang dihasilkan perusahaan (Kılıç & Kuzey, 2019). Pada tahun 2000, terbentuk sebuah organisasi nirlaba yaitu *Carbon Disclosure Project* (CDP). CDP menjalankan sistem pengungkapan global bagi investor, perusahaan, kota, negara, serta wilayah untuk mengelola dampak lingkungannya. Sejak 2002, CDP telah mengirimkan kuesioner yang bersifat sukarela kepada perusahaan. Melalui kuesioner tersebut, CDP meminta perusahaan untuk secara langsung mengungkapkan strategi terkait perubahan iklim dan emisi GRK yang perusahaan hasilkan (CDP, 2022).

Pengungkapan emisi karbon termasuk dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Di Indonesia, pengungkapan emisi karbon masih bersifat sukarela

(*voluntary*), sehingga pada praktiknya perusahaan yang mengungkapkan emisi karbon masih terbatas. Pengungkapan emisi karbon memiliki peran penting dalam kegiatan bisnis perusahaan serta dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Mengungkapkan emisi karbon juga dapat membantu perusahaan dalam memperoleh atau mempertahankan legitimasinya di tengah masyarakat. Menurut Berthelot *et al.*, (2011), dalam mengungkapkan emisi karbon perusahaan memiliki beberapa pertimbangan, diantaranya untuk mendapatkan legitimasi dari para pemangku kepentingan, menghindari ancaman terutama bagi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan GRK seperti meningkatkan *operating costs*, mengurangi permintaan (*reduced demand*), risiko reputasi, proses hukum (*legal proceedings*), serta denda dan penalti.

Demi terlaksananya pengungkapan emisi karbon yang baik, maka diperlukan sebuah mekanisme yang dapat mendukung terciptanya praktik tersebut, yaitu melalui struktur tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Penelitian ini akan menganalisis pengaruh struktur *corporate governance* yaitu dewan direksi, keberagaman gender, komite lingkungan, dan sistem manajemen lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon. Dewan direksi sebagai salah satu bagian dari struktur *corporate governance* yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan strategi bisnis yang berkelanjutan, sehingga memerlukan legitimasi dari masyarakat terhadap perusahaan melalui aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan salah satunya yaitu pengungkapan emisi karbon. Ukuran dewan direksi yang semakin besar dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan. Dengan tingkat pengawasan yang tinggi, maka perusahaan

akan cenderung lebih memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan terhadap lingkungan, seperti melalui upaya perusahaan dalam mengatasi emisi karbon yang dihasilkan perusahaan.

Adanya keberagaman gender dalam komposisi dewan juga memungkinkan perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon. Seringkali komposisi dewan perusahaan hanya berisikan anggota laki-laki, padahal keberadaan perempuan dalam dewan mampu memberikan nilai yang berbeda. Perempuan memiliki sikap yang lebih peduli terhadap kondisi sosial dan lingkungan dibandingkan laki-laki. Menurut Adams & Ferreira (2008), semakin banyak perempuan di dewan dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas dewan, serta perempuan memiliki partisipasi yang lebih baik dalam perusahaan. Besarnya proporsi perempuan dalam dewan direksi mendorong manajemen untuk mengambil tindakan yang bertanggung jawab yang meningkatkan hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan, yaitu melalui pengungkapan. Dalam struktur *corporate governance*, perusahaan seringkali menetapkan suatu komite khusus, seperti komite lingkungan. Komite lingkungan memiliki tanggung jawab atas pengelolaan risiko lingkungan, yaitu mencakup risiko reputasi serta ancaman lingkungan terhadap legitimasi. Komite lingkungan memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, mencatat, serta mengukur emisi GRK secara kredibel (Michelon & Parbonetti, 2012).

Struktur *corporate governance* juga mencakup sistem manajemen lingkungan. Sistem manajemen lingkungan memungkinkan perusahaan untuk mengukur, mencatat, dan mengelola kinerja sosial dan lingkungan perusahaan

(Rankin *et al.*, 2017). Penerapan sistem manajemen lingkungan dalam perusahaan menunjukkan komitmen perusahaan dalam memantau, mengelola, mengukur, serta melaporkan masalah lingkungan dengan lebih baik. Sistem manajemen lingkungan dapat membantu perusahaan dalam pengelolaan emisi karbon yang lebih baik. Menurut Rankin *et al.*, (2017), perusahaan yang mengungkapkan informasi mengenai emisi gas rumah kaca kemungkinan besar juga telah menerapkan sistem manajemen lingkungan dalam sistem tata kelola perusahaannya. Dengan adanya implementasi yang baik pada mekanisme perusahaan, maka diharapkan akan semakin meningkatkan praktik pengungkapan emisi karbon.

Penelitian ini berangkat dari penelitian yang dilakukan oleh Choi *et al.*, (2013) dan Kılıç & Kuzey (2019) yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon. Dasar pengukuran pada kedua penelitian tersebut dan penelitian ini menggunakan *Carbon Disclosure Index* (CDI) yang diadopsi dari penelitian Choi *et al.*, (2013). *Checklist* pada penelitian Choi *et al.*, (2013) dikembangkan berdasarkan lembar *Information Request* yang diberikan oleh *Carbon Disclosure Program* (CDP). Beberapa penelitian telah dilakukan di Indonesia untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pengungkapan emisi karbon. Penelitian oleh Elsayih *et al.*, (2018) menyatakan bahwa struktur *corporate governance* yaitu keragaman dewan yang dilihat dari keberagaman gender dan keberagaman kebangsaan pada dewan berkorelasi signifikan dengan tingkat transparansi karbon, sedangkan keberadaan komite lingkungan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Penelitian yang dilakukan oleh Kılıç & Kuzey (2019) menunjukkan bahwa keberadaan komite

lingkungan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kecenderungan perusahaan dalam mengungkapkan emisi karbon, sedangkan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Dilihat dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan, masih ditemukan inkonsistensi hasil. Variabel dewan direksi dan keberagaman gender telah banyak diteliti pada penelitian-penelitian terdahulu, namun penelitian yang menganalisis pengaruh keberadaan komite lingkungan dan sistem manajemen lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon masih terbatas. Hal tersebut memotivasi peneliti untuk menganalisis pengaruh dewan direksi, keberagaman gender, komite lingkungan, dan sistem manajemen lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon.

1.2 Rumusan Masalah

Perubahan iklim yang ekstrim dan pemanasan global menjadi isu penting dan marak diperbincangkan. Salah satu penyebab utama dari situasi darurat iklim adalah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) atau yang umum dikenal sebagai emisi karbon. Aktivitas operasi perusahaan tak luput menjadi salah satu penyumbang emisi karbon. Pengungkapan emisi karbon termasuk dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Di Indonesia, pengungkapan emisi karbon masih bersifat sukarela (*voluntary*), sehingga pada praktiknya perusahaan yang mengungkapkan emisi karbon masih terbatas. Demi terlaksananya pengungkapan emisi karbon yang baik, maka diperlukan sebuah mekanisme yang dapat mendukung terciptanya praktek tersebut, yaitu melalui struktur tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Penelitian ini akan menganalisis pengaruh struktur *corporate governance* yaitu

dewan direksi, keberagaman gender, komite lingkungan, dan sistem manajemen lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
2. Apakah keberagaman gender berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
3. Apakah komite lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
4. Apakah sistem manajemen lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan bukti empiris mengenai pengaruh dewan direksi, keberagaman gender, komite lingkungan, dan sistem manajemen lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi perusahaan dalam menyusun laporan tahunan perusahaan terkait dengan pengungkapan informasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta kepada khalayak umum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Kontribusi Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kontribusi teori bagi dunia akademik sebagai pelengkap, referensi, dan sumbangan konseptual terhadap penelitian sejenis, yakni mengenai analisis pengungkapan emisi karbon.

2. Kontribusi Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan pengungkapan emisi karbon. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan investor dan calon investor dalam mengambil keputusan investasi.

1.5 Batasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan pengungkapan emisi karbon masih terbatas. Hal tersebut berdampak pada sedikitnya jumlah perusahaan yang dapat diteliti.

1.6 Analisis Data

Langkah analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan, laporan keuangan perusahaan, dan/atau laporan keberlanjutan perusahaan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) maupun situs resmi perusahaan. Data yang digunakan pada penelitian ini berkaitan dengan variabel-variabel penelitian, yaitu pengungkapan emisi karbon perusahaan, ukuran dewan direksi, keberagaman gender dalam

direksi perusahaan, komite lingkungan, sistem manajemen lingkungan, ukuran perusahaan, serta profitabilitas perusahaan.

2. Menghitung Variabel Penelitian

Setelah data yang diperlukan pada penelitian ini diperoleh, maka selanjutnya akan dilakukan perhitungan variabel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu pengungkapan emisi karbon, dewan direksi, keberagaman gender, komite lingkungan, sistem manajemen lingkungan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas.

3. Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis

Setelah semua variabel penelitian dihitung, selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan uji pendahuluan. Uji pendahuluan terdiri dari statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Uji hipotesis terdiri dari koefisien determinasi (R^2), uji nilai F (*goodness of fit test*), dan uji nilai T (uji signifikansi).

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan dari penelitian ini yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab II merupakan landasan teori dan pengembangan hipotesis yang terdiri dari penjelasan teori yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu, serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III memuat penjelasan mengenai jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel, model penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan pada penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi tentang hasil pemilihan sampel, statistik deskriptif, analisis data, dan penjelasan dari setiap hasil statistik yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Bab V menjelaskan tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang peneliti berikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan.